

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Asmuni. 2017. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Setara Press. Malang.

Asshiddiqie, Jimly . 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 1985. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. dkk. 1993. *Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Hanitjo Soemitro, Rony. 1988. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indah. Jakarta.

Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.

_____. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing. Malang.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2001. *Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) dalam teori dan praktik*. Djambatan. Jakarta.

M. Wantu, Fence. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Reviva Cendekia. Gorontalo.

Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitjo. 1988. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indah. Jakarta.

Syamsudin, M., 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

_____. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Tumpa, Harifin.A. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga*, Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

Indrawati, Yuli. Oktober: 2009. *Uang Paksa: Tinjauan Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI.

Lubna. April 2015. Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat. Jurnal Sasi Vol. III No. 7.

Ridwan, H., Despan, dan Kus Pratiwi, Dian. Mei 2018. *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. IUS QUIA IUSTUM VOL. 25 No.2.

Ujang, H. Abdullah, S.H., M.Si, *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Hukum Perdata *Rechts-Vordering* (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63).

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/G/2015/PN.MKS.

Internet :

Hamdani, *“Efektifitas Uang Paksa dalam Sanksi Administratif Negara”*
(<http://kiemdhaninspiration.blogspot.co.id>) di akses pada 26 Mei 2016.

